

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

(LAKIP)

TAHUN 2020



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CIREBON**

Jln Sunan Muria No. 04 Sumber

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, bahwa kami telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode tahun 2020 sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi kinerja instansi pemerintah untuk mendorong pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara baik, benar, akuntabel, efisien, responsif terhadap aspirasi pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, guna menjadi pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mendapatkan kepercayaan dari *stakeholder*.

Pembuatan laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Laporan hasil kinerja selama satu tahun ini merupakan tolak ukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan misi. Bilamana organisasi mencapai keberhasilan maka akan dipertahankan, dan jika organisasi ini menemui kegagalan, maka akan diperbaiki seoptimal mungkin.

Demikian laporan hasil kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sebagai bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang mempunyai tugas dalam mengkaji dan mengevaluasi hasil akuntabilitas kinerja bidang kependudukan.

Sumber, Februari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON



Dr. H. ADE SETIADI, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611224 198903 1 004

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Singkat Organisasi	1
B. Isu Strategis yang Berpengaruh	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi	4
D. Dasar Hukum	4
E. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Stratejik Organisasi	7
1. Visi dan Misi	7
2. Tujuan dan Sasaran	7
3. Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	16
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	25
C. Akuntabilitas Keuangan	26
D. Analisa Efisiensi dan Efektivitas	28
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI

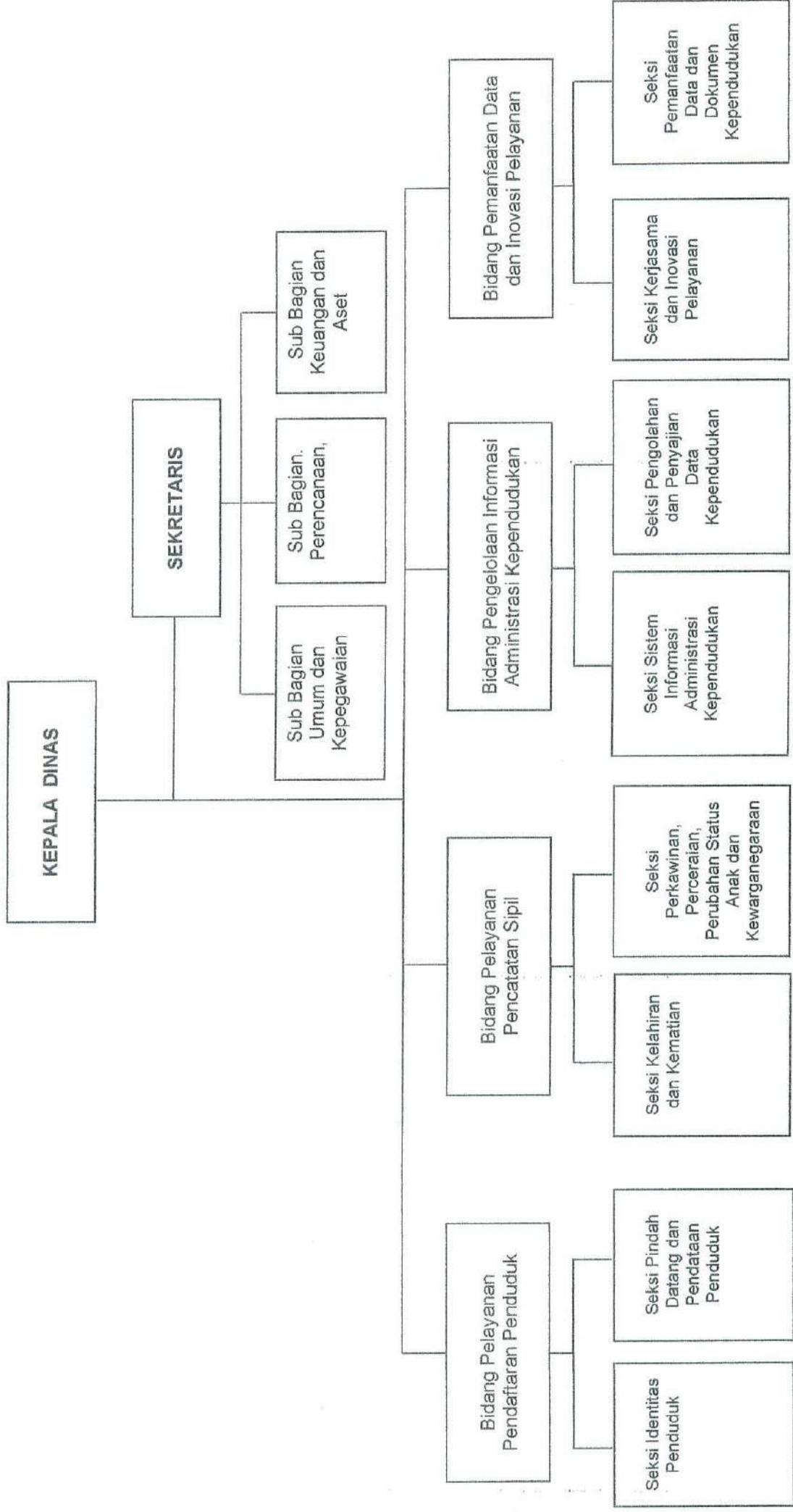
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon membawahi satu Bagian Sekretariat dengan tiga Kepala Sub Bagian, dan empat Kepala Bidang dengan delapan Kepala Seksi, sebagaimana struktur organisasi terlampir.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 pasal 10 ayat (3), terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan aset;
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 - a. Seksi Identitas Penduduk ;
 - b. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan;
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi :
 - a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
 - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
KABUPATEN CIREBON**



B. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.



Tuntutan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya menyangkut Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon harus didukung melalui pelayanan yang prima dan profesional oleh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon agar hubungan dan mekanisme kerja antara Eksekutif dan Legislatif dapat terbina untuk menciptakan suatu kesatuan gerak dan langkah yang kondusif dalam satu rantai kerja yang harmonis.

Dari hal yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dipahami bahwa proses Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon merupakan bagian dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Kepala Daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya mewujudkan Pemerintah Daerah yang Akuntabel.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

“Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 pasal 10 ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pendataan dan perkembangan kependudukan;
4. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. DASAR HUKUM

1. Dasar Hukum Organisasi

Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
4. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Dasar Hukum Operasional

Adapun Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
4. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI Tahun 2013 tanggal 30 April 2013 tentang pencatatan kelahiran melebihi satu tahun tidak memerlukan penetapan pengadilan.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2304/SJ tanggal 6 Mei 2013 tentang pelaksanaan putusan MK
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
11. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
12. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Sanksi Administrasi Kependudukan denda Keterlambatan Penetapan bagi Pemohon Akta Kelahiran Anak Usia 0–18 Tahun dan Akta Kematian.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diawali dengan ikhtisar eksekutif yang didalamnya memuat gambaran/penjelasan umum sebagai inti dari keseluruhan isi laporan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang gambaran umum organisasi, kedudukan, tupoksi dan aspek-aspek strategik organisasi, dasar hukum serta sistematika penyajian laporan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan mengenai rencana strategik, penetapan kinerja dan anggaran tahun 2020. Pada bab ini akan disampaikan visi, misi tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil disertai dengan analisis efisiensi dan efektifitas

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2019-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2020 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2020.

A. RENCANA STRATEJIK ORGANISASI

1. Visi dan Misi

A. VISI

Sesuai tugas pokok dan fungsi serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon mempunyai VISI :

“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Cirebon “

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon harus mempunyai Misi yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima yaitu :

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dalam bidang Administrasi Kependudukan
--

2. TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsi yang diemban, secara kolektif, menggambarkan arah strategis instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Tujuan juga menggambarkan isu-isu strategis yang harus dihadapi dan diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga rumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dapat merealisasikan misi yang diemban. Adapun rumusan tujuan dalam

perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon adalah :

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik

B. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran-sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon adalah suatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerjanya sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai dan untuk itulah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik

	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat
2.	Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil lengkap	Prosentase Keluarga dengan kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap

3. STRATEGI (CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN)

Adalah faktor penting dalam proses perencanaan strategis cara pencapaian tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaiannya. Strategi yang dibangun ini dilandasi kepada informasi dan data-data yang diperoleh dari analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan

faktor-faktor kunci keberhasilan. Penjabaran strategi diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana akan dikemukakan berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publi

Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
		Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
1.1	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Peningkatan aksesibilitas , kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian pelayanan publik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
				Penyediaan Alat Tulis Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				Penyediaan Makanan dan Minuman
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
				Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
				Pemeliharaan dan Penataan Arsip Administrasi Kependudukan

Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
		Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
			Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral
1.2	Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil lengkap	Peningkatan aksesibilitas , kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian pelayanan publik	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan
				Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
				Penyusunan kebijakan kependudukan
				Pelayanan Mutasi dan Mobilisasi Penduduk
				Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pendaftaran Penduduk
				Pelayanan Perekaman KTP-EI Secara Mobile
				Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kelahiran Secara Online
				Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)
			Penyelenggaraan SIAK Online	Implementasi SIAK
				Pemeliharaan Program dan Sistem Jaringan SIAK
			Pendataan dan Perkembangan Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan

Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
		Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				Validasi Data Base dan Data Agregat Kependudukan
			Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Secara Mobile
				Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian
				Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengesahan dan Pengakuan Anak
			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
				Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
				Bimbingan Teknis Pengelola Administrasi Kependudukan
				Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
				Pelayanan Dokumen Kependudukan
				Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak
				Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
				Koordinasi dan Konsultasi Terkait Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Untuk tahun 2020 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon menetapkan kinerja sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	578.461.900
		Jumlah Rekening yang di bayar	4 jenis	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232.100.000
		Jumlah STNK Kendaraan bermotor roda dua dan empat yang terbayarkan	26 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	10.080.000
		Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara	3 jenis	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	16.400.000
		Jumlah jenis ATK yang tersedia	73 jenis	Penyediaan Alat Tulis Kantor	63.495.500
		Jumlah barang cetakan yang dibutuhkan	15 jenis	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.649.200
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	10 jenis	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	8.292.200
		Jumlah jenis peralatan rumah tangga perkantoran yang tersedia	2 buah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	540.000
		Jumlah surat kabar/koran yang dibutuhkan	3 Surat Kabar/Koran	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000
		Jumlah kunjungan tamu kedinasan dari instansi pemerintah dan non pemerintah lainnya yang berkunjung/konsultasi/koordinasi	4 Kali/Tahun	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.440.000
		Jumlah undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7 laporan	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	31.875.000
		Jumlah tenaga keamanan/sekuriti	4 Orang	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor	169.390.000
		Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	262.998.100
		Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik (kondisi aman dan nyaman) dan layak ditempati	1 Unit Bangunan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	173.283.400
		Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua dan empat dengan kondisi baik (aman dan nyaman) dan siap pakai	19 unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	63.100.000
		jumlah arsip yang dipelihara	20000 berkas	Pemeliharaan dan Penataan Arsip Administrasi Kependudukan	26.614.700,
		Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.984.200

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Jumlah dokumen DPA/DPPA, SP/IKM, Monev, SPIP, Renaksi RB dan PPK, LKPJ, LAKIP, dan LPPD SKPD yang diselesaikan	2 Dokumen	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.976.000
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang diselesaikan	1 Dokumen	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	5.332.600
		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas	1 Dokumen	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.675.600
		Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas		Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor	27.887.700
		Jumlah dokumen renstra, review renstra, renja dan perubahan renja SKPD yang diselesaikan	4 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor	27.887.700
2	Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil lengkap	Prosentase Keluarga dengan kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap		Program Penataan Administrasi Kependudukan	758.157.100
		Jumlah Rakor pemanfaatan data kependudukan	1 kali	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	5.750.000
		Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	1 Aplikasi	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	82.140.000
		Jumlah Kebijakan Kependudukan yang tersedia	1 Dokumen	Penyusunan kebijakan kependudukan	4.400.000
		Surat keterangan pindah, datang, SKTT	2000 pemohon	Pelayanan Mutasi dan Mobilisasi Penduduk	61.631.000
		Terbitnya kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga	50000 keping	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pendaftaran Penduduk	485.287.300
		Pelaksanaan pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el secara Mobile berjalan dengan baik	1 Dokumen	Pelayanan Perekaman KTP-EI Secara Mobile	289.200
		Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil Berbasis IT	1 Dokume	Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kelahiran Secara Online	13.389.600
		Terbitnya Kartu Identitas Anak (KIA)	20000 keping	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	105.270.000
				Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	
		Penerapan Aplikasi SIAK di Kabupaten Cirebon		Program Penyelenggaraan SIAK Online	71.181.000
		Berfungsi dan Terkoneksinya SIAK Online di 40 Kec dan Dinas	30 unit	Implementasi SIAK	35.868.000
		Terpelihara dan Terkoneksinya SIAK Online Di 40 Kecamatan dan 1 Dinas	41 unit	Pemeiliharaan Program dan Sistem Jaringan SIAK	35.313.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Peningkatan kualitas Database Kependudukan		Program Pendataan dan Perkembangan Kependudukan	26.769.000
		Database Penduduk yang mutahir		Penyusunan Profil Kependudukan	23.544.000
		Database Penduduk yang Valid		Validasi Data Base dan Data Agregat Kependudukan	3.225.000
		prosentase pemenuhan pelayanan Akta-akta pencatatan sipil		Program Pelayanan Pencatatan Sipil	444.342.200
		prosentase cakupan penerbitan akat perkawinan			
		prosentase cakupan penerbitan akat kelahiran			
		Jumlah laporan pelayanan akta kelahiran secara mobil	1 Dokumen	Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Secara Mobile	7.414.000
		Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan	45000 kutipan	Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian	417.134.200
		Pelayanan Administrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak Pemohon	1 Dokumen	Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengesahan dan Pengakuan Anak	19.794.000
		Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan	15.950.500
		Tersedianya laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	6.275.500
		Tersebarnya Informasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1 kegiatan	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	2.550.000
		Tersedianya Petugas Registrasi ditingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan	1 kegiatan	Bimbingan Teknis Pengelola Administrasi Kependudukan	6.225.000
		Tersedianya Dokumen Laporan IKM	1 kegiatan	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	900.000
		Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.900.867.000
		Jumlah peserta Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan Adminduk	150 orang	Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	71.305.400
		Jumlah KTP EI yang diterbitkan	5000 KTP	Pelayanan Dokumen Kependudukan	245.400.000
		Jumlah blanko Kartu Keluarga yang disediakan	55000 Keping	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	3.525.921.600

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Terpelihara dan Terkoneksinya SIAK	17 unit	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1.120.000
		Jumlah undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250 Laporan	Koordinasi dan Konsultasi Terkait Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	57.120.000
Jumlah					6.107.598.700

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Eksistensi dari institusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon sebagai salah satu fungsi Manajemen yang memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang lain, diharapkan menjadi lembaga yang strategis dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) tersebut, lembaga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon berperan aktif untuk mewujudkannya dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada dan mencoba mengimplementasikan rencana strategis tahun 2019-2024 yang pada tahun 2020 ditetapkan untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis.

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Media pengukuran kinerja adalah Lampiran Pengukuran Kinerja (PK).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

- 100 keatas = Target Tercapai
- Dibawah 100 = Target Tidak Tercapai.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

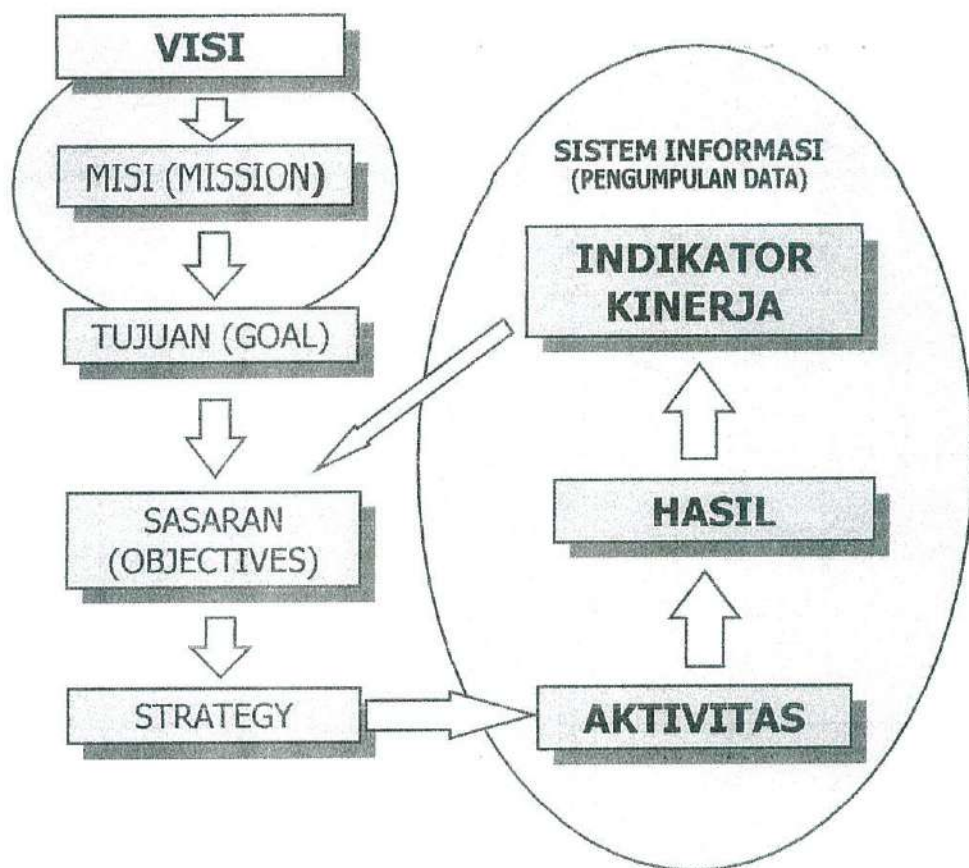
Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*).

Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

SISTEM AKIP & POLA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA



Pada tahun anggaran 2020 sebanyak 2 (dua) sasaran telah dilaksanakan dengan hasil capaian sebagaimana tergambar dalam uraian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan

Sasaran ini meliputi indikator adalah Indeks Kepuasan Masyarakat

Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan dengan indikator Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp. 578.461.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 531.595.787,- dengan prosentase capaian sebesar 91,90 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan dengan indikator Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur, dengan anggaran sebesar Rp.262.998.100,- dan terealisasi sebesar Rp.253.768.224,- dengan prosentase capaian sebesar 96,49 %

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dilaksanakan dengan indikator Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif, dengan anggaran sebesar Rp. 20.984.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.256.700,- dengan prosentase capaian sebesar 87,00 %

4. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor

Program ini dilaksanakan dengan indikator Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas, dengan anggaran sebesar Rp.27.887.700,- dan terealisasi sebesar Rp.27.356.600,- dengan prosentase capaian sebesar 98,10 %

2. Cakupan Keluarga yang sudah memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil lengkap

Sasaran ini meliputi indikator Prosentase Keluarga dengan kepemilikan Dokumen Kependudukan yang lengkap.

Indikator tersebut dicapai melalui Program :

A. Program Penataan Administrasi Kependudukan yang dijabarkan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan

Kegiatan Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan merupakan kegiatan rutin dalam Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp 5.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp.5.325.000,- dengan prosentase capaian sebesar 92,61 %

2. Kegiatan Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

Kegiatan Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat merupakan kegiatan rutin dengan anggaran sebesar Rp. 82.140.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 79.117.000,- dengan prosentase capaian sebesar 96,32 %

3. Kegiatan Penyusunan kebijakan kependudukan

Kegiatan Penyusunan kebijakan kependudukan merupakan kegiatan rutin dengan anggaran sebesar Rp 4.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp.4.150.000,- dengan prosentase capaian sebesar 94,32 %

4. Kegiatan Pelayanan Mutasi dan Mobilisasi Penduduk

Kegiatan Pelayanan Mutasi dan Mobilisasi Penduduk Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelayanan mutasi dan mobilisasi penduduk yang salah satu fokus utamanya melayani pemohon surat keterangan pindah, dengan anggaran sebesar Rp.61.631.000,- dan teralisasi sebesar Rp.58.084.338,- dengan prosentase capaian sebesar 94,25 %

5. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pendaftaran Penduduk

Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang Pendaftaran Penduduk, pada tahun 2020 ditargetkan untuk memenuhi permintaan pemohon 130.000 set KK dan 150.000 keping KTP-EI.

Kegiatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan merupakan kegiatan rutin dalam memberikan pelayanan dokumen identitas kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) dan Kartu Keluarga (KK) dengan anggaran sebesar Rp 485.287.300,- dan terealisasi sebesar Rp.474.946.386,- dengan prosentase capaian sebesar 97,87 %

Target pelayanan Kartu Keluarga Tahun 2020 sebanyak 130.000 lembar KK, realisasi pencapaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebanyak 130.118 lembar KK

6. Kegiatan Pelayanan Perekaman KTP-EI Secara Mobile

Kegiatan Pelayanan Perekaman KTP-EI Secara Mobile pada tahun 2020 ditargetkan 100%.

Kegiatan Pelayanan Perekaman KTP EI Secara Mobile merupakan kegiatan yang memberikan pelayanan terhadap Penduduk yang belum melaksanakan perekaman KTP EI dengan anggaran sebesar Rp. 289.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 289.200,- dengan prosentase capaian sebesar 100,00 %

Target pelayanan adalah terlayannya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP eletronik secara Mobile

7. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kelahiran Secara Online

Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kelahiran Secara Online merupakan kegiatan rutin Bidang Pencatatan Sipil dengan anggaran sebesar Rp 13.389.600,- dan terealisasi sebesar Rp.13.389.600,- dengan prosentase capaian sebesar 100,00 %

8. Kegiatan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kegiatan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2020 ditargetkan 20.000 orang. .

Kegiatan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan kegiatan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan anggaran sebesar Rp.105.270.000,- dan teralisasi sebesar Rp.101.683.718,- dengan prosentase capaian sebesar 96,59 %

Target pelayanan adalah Masyarakat khususnya Kabupaten Cirebon yang usia anaknya dibawah 17 tahun sudah memiliki Kartu Identitas Anak), pencapaian Kartu Identitas Anak (KIA) adalah 13.662 keping.

B. Program Penyelenggaraan SIAK Online yang dijabarkan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Implementasi SIAK

Untuk Pemeliharaan jaringan wireless agar dapat berfungsi optimal dalam membangun komunikasi data antar kecamatan dan dinas yang menunjang pelayanan KTP dan KK, dilaksanakan kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan dengan anggaran Rp.35.868.000,- dan teralisasi sebesar Rp.34.011.874,- dengan prosentase capaian sebesar 94,83 %

Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Belanja Pemeliharaan (Pergantian Suku Cadang Peralatan Jaringan)

Kelancaran pelayanan KTP dan KK sangat ditentukan oleh sistem interkoneksi data dari kecamatan dan dinas serta sebaliknya. Oleh karena itu untuk mengantisipasi gangguan interkoneksi data tersebut, telah dilakukan belanja Pemeliharaan (Pergantian Suku Cadang Peralatan Jaringan) sehingga bila terjadi gangguan interkoneksi data/ jaringan *wireless* baik di kecamatan maupun dinas yang disebabkan oleh faktor cuaca, akibat peralatan listrik atau oleh sebab-sebab lainnya bisa segera diadakan perbaikan.

2. Pemeliharaan Tower.

Salah satu faktor yang menentukan interkoneksi data/ jaringan *wireless* adalah keberadaan tower. Tanpa tower maka interkoneksi data akan terganggu. Oleh karena itu agar interkoneksi data tidak terganggu telah dilakukan upaya pemeliharaan tower pada beberapa tower yang memang dipandang perlu pemeliharaan. Untuk tahun 2020 telah dilakukan pemeliharaan tower pada 30 unit tower yang ada kecamatan.

Kegiatan yang dilakukan pada pemeliharaan tower ini antara lain memperkuat sling tower, pengencangan baut dan mur, pengecatan tower serta memperkuat pondasi tower dan pointing.

3. Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem Interkoneksi Data.

Pemeliharaan dan perbaikan Sistem Interkoneksi Data pada tahun 2020 dilakukan pada kecamatan-kecamatan yang mengalami gangguan interkoneksi data/ jaringan *wireless* maupun pada BTS-BTS yang mengalami gangguan. Perbaikan sistem interkoneksi data baik dikecamatan maupun BTS biasanya dilakukan terhadap jaringan *wireless* yang mengalami kerusakan. Kerusakan pada jaringan *wireless* disebabkan oleh berbagai faktor antara lain tower yang ada di kecamatan tersambar petir atau adanya kejutan listrik pada jaringan *wireless* yang menyebabkan radio dan peralatan lainnya terbakar sehingga tidak berfungsi lagi. Perbaikan yang dilakukan adalah dengan mengganti peralatan yang rusak. Sedangkan pemeliharaan dilakukan pada beberapa jaringan *wireless* yang tidak terkoneksi yang diakibatkan oleh faktor cuaca misalnya perubahan arah antena karena angin kencang ataupun yang lainnya. Pemeliharaan yang dilakukan adalah dengan merubah arah antena atau pointing sehingga jaringan *wireless* terkoneksi kembali.

2. Kegiatan Pemeliharaan Program dan Sistem Jaringan SIAK

Untuk Pemeliharaan Program dan Sistem Jaringan SIAK agar dapat berfungsi optimal dalam membangun komunikasi data antar kecamatan dan dinas yang menunjang pelayanan kepengurusan administrasi kependudukan, dilaksanakan kegiatan Program dan Sistem Jaringan SIAK dengan anggaran Rp.35.313.000,- dan teralisasi sebesar Rp.34.966.830,- dengan prosentase capaian sebesar 99,02 % Kegiatan ini meliputi :

a. Maintenance/Pemeliharaan Database.

Database kependudukan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon memiliki peran sangat penting sekali khususnya bagi pelayanan bidang pendaftaran penduduk yang menangani pelayanan elektronik, KK, surat pindah datang dan lainnya. Oleh karena itu database kependudukan yang ada dalam server dinas harus dijaga dan dipelihara sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan lancar. Kegiatan *maintenance Operating System* seperti Windows di scan virus, *maintenance PHP Symphony*, Oracle Database dan Aplikasi SIAK misalnya di Back up data dan sebagainya.

b. Konsolidasi Database

Selain itu database kependudukan ini di konsolidasikan baik ke server Provinsi Jawa Barat maupun Pusat. Dengan konsolidasi database kependudukan bisa diolah menjadi Profil Kependudukan Tahun 2019.

c. Integrasi Data

Selain dari kedua hal tersebut di atas untuk kelancaran pelaksanaan E-KTP (KTP elektronik) di Kab. Cirebon, telah dilakukan intergrasi data E-KTP dari pusat ke Database SIAK

C. Program Pendataan dan Perkembangan Kependudukan yang dijabarkan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

Untuk kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan agar dapat berjalan optimal dalam penyusunan profil kependudukan dengan anggaran Rp.23.544.000,- dan teralisasi sebesar Rp.23.462.874,- dengan prosentase capaian sebesar 99,66 % Kegiatan tersebut meliputi : :

- a. Tersedianya Buku Profil Kependudukan
- b. Tersedianya Buku Induk Kependudukan
- d. Penyusunan Buku Profil Kependudukan dan Buku Induk Kependudukan

Penyusunan Buku Profil Kependudukan dan Buku Induk Kependudukan. Buku ini berisi jumlah kepala keluarga baik kepala keluarga laki-laki maupun perempuan, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, Jumlah wajib KTP-EI dan Jumlah Hak pilih juga laki-laki dan perempuan per kecamatan dan kabupaten.

Data ini tidak saja dimanfaatkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil kab. Cirebon tetapi juga dimanfaatkan oleh Dinas/

instansi lain seperti bagian perekonomian Setda Kab. Cirebon, KPU dan sebagainya

2. Kegiatan Validasi Data Base dan Data Agregat Kependudukan
Untuk kegiatan Validasi Data Base dan Data Agregat Kependudukan agar dapat berjalan optimal dalam rangka Validasi dan Data Agregat Kependudukan yang menunjang pengolahan database kependudukan dengan anggaran Rp.3.225.000,- dan teralisasi sebesar Rp.2.325.000,- dengan prosentase capaian sebesar 72,09 %

D. Program Program Pelayanan Pencatatan Sipil yang dijabarkan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Secara Mobile dengan anggaran Rp.7.414.000,- dan teralisasi sebesar Rp.7.414.000,- dengan prosentase capaian sebesar 100,00 %
2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian dengan anggaran Rp.417.134.200,- dan teralisasi sebesar Rp.408.259.970,- dengan prosentase capaian sebesar 97,87 %
3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengesahan dan Pengakuan Anak dengan anggaran Rp.19.794.000,- dan teralisasi sebesar Rp.19.712.874,- dengan prosentase capaian sebesar 99,59 %

Adapun target penerbitan akta-akta pencatatan sipil tahun 2020 sebanyak 55.000 lembar, dan realisasi penerbitan akta-akta pencatatan sipil tahun 2020 sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET	PENCAPAIAN
1	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	55.000	51.206
2	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	2.100	3.624
3	Cakupan Akta-Akta Pencatatan Sipil Lainnya		
	- Akta Perkawinan		35
	- Akta Perceraian		9
	- Pengakuan Anak		13
	- Pengesahan Anak		8
	- Pengangkatan Anak		3

E. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan dijabarkan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran Rp.6.275.500,- dan teralisasi sebesar Rp.6.275.500,- dengan prosentase capaian sebesar 100,00 %
2. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dengan anggaran Rp.2.550.000,- dan teralisasi sebesar Rp.2.550.000,- dengan prosentase capaian sebesar 100,00 %
3. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Administrasi Kependudukan dengan anggaran Rp.6.225.000,- dan teralisasi sebesar Rp.6.225.000,- dengan prosentase capaian sebesar 100,00 %
4. Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan anggaran Rp.900.000,- dan teralisasi sebesar Rp.0,- dengan prosentase capaian sebesar 0 %

F. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan

Program Pelayanan Administrasi Kependudukan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) dijabarkan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan anggaran Rp.71.305.400,- dan teralisasi sebesar Rp.68.146.000,- dengan prosentase capaian sebesar 95,57 %
2. Kegiatan Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan anggaran Rp.245.400.000,- dan teralisasi sebesar Rp.131.500.000,- dengan prosentase capaian sebesar 53,59 %
3. Kegiatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak dengan anggaran Rp.3.525.921.600,- dan teralisasi sebesar Rp.3.124.529.300,- dengan prosentase capaian sebesar 88,62 %
4. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan anggaran Rp.1.120.000,- dan teralisasi sebesar Rp.520.000,- dengan prosentase capaian sebesar 46,43 %
5. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Terkait Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan anggaran Rp.57.120.000,- dan teralisasi sebesar Rp.50.319.197,- dengan prosentase capaian sebesar 88,09 %

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sebagaimana telah diuraikan di atas dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2019 – 2024, ada 2 (dua) sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2020, dan yang perlu dianalisis lebih lanjut yaitu :

1. Meminimalisir keluhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan

Kegiatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan merupakan kegiatan rutin dalam memberikan pelayanan dokumen identitas kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) dan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan, pada tahun 2020 target penerbitan KTP-Ei sebanyak 150.000 keping dan KK sebanyak 225.000. Realisasi untuk tahun 2020 ini penerbitan KTP sebanyak 472.506 keping dan KK sebanyak 130.118 set.

2. Terlayannya Hak-hak Status Pribadi dan Status Hukum Bagi Penduduk

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil merupakan kegiatan rutin dalam memberikan pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil dengan target penerbitan Akta Pencatatan Sipil pada Tahun 2020 sejumlah 60.000 lembar, adapun realisasi adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TARGET	PENCAPAIAN
1	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	225,000	130.118
2	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	150,000	472.506
3	Cakupan Surat Pindah Datang	27,000	54.138
4	Kartu Identitas Anak (KIA)	20.000	13.662
5	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	60,000	51.206
6	Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kematian	2100	3.624
7	Cakupan Akta-Akta Pencatatan Sipil Lainnya		
	- Akta Perkawinan		35
	- Akta Perceraian		9
	- Pengakuan Anak		13
	- Pengesahan Anak		8
	- Pengangkatan Anak		3

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi Program Kegiatan dan Anggaran dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
				Rp.	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		578,461,900	531,595,787	91.90
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232,100,000	196,668,888	84.73
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	10,080,000	7,508,900	74.49
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	16,400,000	14,096,000	85.95
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	63,495,500	63,495,500	100.00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37,649,200	37,449,200	99.47
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	8,292,200	8,263,200	99.65
		Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8,292,200	8,263,200	99.65
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	540,000	540,000	100.00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,200,000	7,200,000	100.00
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	31,875,000	26,054,100	81.74
		Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor	169,390,000	168,879,999	99.70
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		262,998,100	253,768,224	96.49
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	173,283,400	169,444,307	97.78
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	63,100,000	59,075,000	93.62
		Pemeliharaan dan Penataan Arsip Administrasi Kependudukan	26,614,700	25,248,917	94.87
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		20,984,200	18,256,700	87.00
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,976,000	8,146,000	81.66
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	5,332,600	5,002,600	93.81
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5,675,600	5,108,100	90.00
4	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral		27,887,700	27,356,600	98.10
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	27,887,700	27,356,600	98.10
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan		758,157,100	736,985,242	97.21
		Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	5,750,000	5,325,000	92.61
		Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	82,140,000	79,117,000	96.32

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
				Rp.	%
		Penyusunan kebijakan kependudukan	4,400,000	4,150,000	94.32
		Pelayanan Mutasi dan Mobilisasi Penduduk	61,631,000	58,084,338	94.25
		Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pendaftaran Penduduk	485,287,300	474,946,386	97.87
		Pelayanan Perekaman KTP-EI Secara Mobile	289,200	289,200	100.00
		Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kelahiran Secara Online	13,389,600	13,389,600	100.00
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	105,270,000	101,683,718	96.59
6	Penyelenggaraan SIAK Online		71,181,000	68,978,704	96.91
		Implementasi SIAK	35,868,000	34,011,874	94.83
		Pemeilharan Program dan Sistem Jaringan SIAK	35,313,000	34,966,830	99.02
7	Pendataan dan Perkembangan Kependudukan		26,769,000	25,787,874	96.33
		Penyusunan Profil Kependudukan	23,544,000	23,462,874	99.66
		Validasi Data Base dan Data Agregat Kependudukan	3,225,000	2,325,000	72.09
8	Program Pelayanan Pencatatan Sipil		444,342,200	435,386,844	97.98
		Penataan Pelayanan Perkawinan dan Perceraian	-	-	-
		Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Secara Mobile	7,414,000	7,414,000	100.00
		Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian	417,134,200	408,259,970	97.87
		Peningkatan Pelayanan dan Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengesahan dan Pengakuan Anak	19,794,000	19,712,874	99.59
9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan		15,950,500	15,050,500	94.36
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	6,275,500	6,275,500	100.00
		Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	2,550,000	2,550,000	100.00
		Bimbingan Teknis Pengelola Administrasi Kependudukan	6,225,000	6,225,000	100.00
		Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	900,000	-	-
10	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan		3,900,867,000	3,375,014,497	86.52
		Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	71,305,400	68,146,000	95.57
		Pelayanan Dokumen Kependudukan	245,400,000	131,500,000	53.59
		Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak	3,525,921,600	3,124,529,300	88.62
		Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1,120,000	520,000	46.43

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
				Rp.	%
		Koordinasi dan Konsultasi Terkait Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	57,120,000	50,319,197	88.09
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG		6,107,598,700	5,488,180,972	89.86

E. ANALISA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

Dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020.

Untuk mengimbangi rencana dan realisasi anggaran, maka pada tahun anggaran 2021 akan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana melalui perencanaan yang lebih matang dan meminimalisir terhadap penggunaan sarana dan prasarana yang menimbulkan pemborosan.

BAB IV PENUTUP

Pada dasarnya bahwa tugas-tugas yang diemban oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon dalam Tahun Anggaran 2020 dengan 2 (dua) sasaran tersebut dalam renstra masih dalam proses pencapaian.

Fungsi utama yang diharapkan, dilaksanakan lembaga ini sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam tahun 2020 telah berjalan dengan tidak mengalami hambatan yang berarti.

Indikator dari kondisi tersebut dapat dilihat dari indikator sasaran yang sedang dilaksanakan (masih berjalan) dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan.

Disadari atau tidak, kekurangan pasti ada dan diperlukan sebagai bahan introspeksi guna perbaikan, guna mempertahankan yang sudah ada bahkan meningkatkan kinerja yang telah tercapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Sumber, Februari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON



Dr. H. ADE SETIADI, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611224 198903 1 004

SASARAN STRATEGIS				INDIKATOR KINERJA				TARGET				
								TK.I	TK.II	TK.III	TK.IV	
	✓	✓	✓	Jumlah jenis ATK yang tersedia	✓	✓	✓	Penyediaan Bahan/Material				
	✓	✓	✓	Jumlah undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	✓	✓	✓	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	✓	✓	✓	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	✓	✓	✓	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	✓	✓	✓	Jumlah Rekening yang di bayar	✓	✓	✓	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	✓	✓	✓	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	✓	✓	✓	Sumber Daya Air dan Listrik				
	✓	✓	✓	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	✓	✓	✓	Perengkapan Kantor				
	✓	✓	✓	Jumlah STNK Kendaraan bermotor roda empat yang terbayarkan	✓	✓	✓	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	✓	✓	✓	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat dengan kondisi baik (aman dan nyaman) dan siap pakai	✓	✓	✓	Penyediaan Jasa				
	✓	✓	✓	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik (kondisi aman dan nyaman) dan layak ditempati	✓	✓	✓	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	Penyediaan Jasa				
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	✓	✓	✓		✓	✓	✓	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				

Februari 2021
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 DR. H. ADE SETIADI, Drs., MM.
 NIP. 19611224 198903 1 004

SASARAN STRATEGIS				INDIKATOR KINERJA				TARGET			
								TK.I	TK.II	TK.III	TK.IV
	√	√	√	Terbitnya Dokumen Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Perceraian, Digitalisasi Arsip Pelayanan Sipil berbasis IT	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelanggaran Peristiwa Penting						
				Jumlah laporan pelayanan akta kelahiran secara mobil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil secara mobile	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						
				Pelayanan dokumen Pencatatan Sipil secara	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil						
				Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		75,102,000	154,711,000	73,271,000	429,621,000		
	√	√	√	Jumlah OPD dan Desa yang telah memanfaatkan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						
				Penerapan Aplikasi SIAK di Kabupaten Cirebon							
				Peningkatan kualitas Database Kependudukan							
				Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan							
				Tersediannya Database Kependudukan yang valid		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan					
				Database Penduduk yang Valid		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan					
				Dokumen Pelaporan Pemanfaatan Data dan Aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan					
				Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berjalan dengan baik		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
		TK.I	TK.II	TK.III	TK.IV

Sumber, Januari 2021
 Kepala Dinas Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon



OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)															
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Jumlah barang cetakan yang dibutuhkan		Penyediaan Berang Cetakan dan Pengandaan			53,338,000													
Jumlah penggandaan yang dibutuhkan		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,278,000	1,278,000	1,278,000	1,278,000	1,278,000	1,278,000	1,278,000	1,278,000	1,278,000	1,278,000	1,278,000	1,278,000	1,278,000	1,278,000	1,278,000	1,278,000
Jumlah surat kabar/koran yang dibutuhkan		Penyediaan Bahan/Material			109,086,100													
Jumlah jenis ATK yang tersedia		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	13,585,000	14,260,000	9,340,000	9,739,500	8,524,000	8,524,000	9,374,000	8,524,000	6,240,000	8,524,000	6,240,000	5,775,000	4,865,000	4,865,000	14,242,000	
Jumlah undangan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22,013,000	23,433,000	23,933,000	23,433,000	23,933,000	23,933,000	22,743,000	23,933,000	22,013,000	22,013,000	21,160,000	20,660,000	20,050,000	20,050,000	20,049,916	
Jumlah Rekening yang di bayar		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,050,000	20,050,000	20,050,000	20,050,000	20,050,000	20,050,000	20,050,000	20,050,000	20,050,000	20,050,000	20,050,000	20,050,000	20,050,000	20,050,000	20,049,916	
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli/hara		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,963,000	3,383,000	3,883,000	3,383,000	3,383,000	3,883,000	2,693,000	3,883,000	1,963,000	1,963,000	1,110,000	610,000				
Terpeliharanya Barang Milik Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
Jumlah STNK Kendaraan bermotor roda empat yang terbayarkan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,875,000					7,725,000	2,137,500								855,000	
Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat dengan kondisi baik (aman dan nyaman) dan siap pakai		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9,375,000	9,375,000	9,375,000	9,375,000	9,375,000	9,375,000	9,375,000	9,375,000	9,375,000	9,375,000	9,375,000	9,375,000	9,375,000	9,375,000	375,000	
Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik (kondisi aman dan nyaman) dan layak ditempati		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18,169,700	11,257,000	245,337,000	11,257,000	11,257,000	11,257,000	11,257,000	11,257,000	11,257,000	11,257,000	11,257,000	11,257,000	11,257,000	11,257,000	11,257,000	11,257,000



PAGU ANGGARAN (Rp.)														
OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan Tersediannya Database Kependudukan yang valid		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	5,175,000	-	5,175,000	-	-	5,050,000	-	-	171,769,400	-	-
Database Penduduk yang Valid		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		3,275,000		3,275,000			3,150,000			78,618,900		
Dokumen Pelaporan Pemanfaatan Data dan Aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		1,900,000		1,900,000			1,900,000			93,150,500		
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berjalan dengan baik		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14,876,000	14,876,000	14,876,000	14,876,000	14,618,000	14,618,000	14,274,000	14,274,000	14,274,000	30,218,000	12,448,500	12,448,500
Tersedianya Repet Koordinasi dan Konsultasi terkait kebijakan Administrasi Kependudukan		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14,876,000	14,876,000	14,876,000	14,876,000	14,618,000	14,618,000	14,274,000	14,274,000	14,274,000	30,218,000	12,448,500	12,448,500
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berjalan dengan baik														
Terpelihara dan Terkoneksinya Jaringan SIAK dengan baik		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4,108,000	15,408,000	4,108,000	15,533,000	4,108,000	84,108,000	15,508,000	4,108,000	4,108,000	164,030,600	4,108,000	4,108,000
Tersedianya Data Adminduk melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS)		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		3,600,000		3,600,000			3,600,000			21,528,400		
Tersebarinya informasi tentang Adminduk kepada Masyarakat		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		3,475,000		3,475,000			3,350,000			35,783,200		
Berfungsi dan Terkoneksinya SIAK Online di 40 Kecamatan dan Dinas		Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Diertanggungjawabkan	4,108,000	8,333,000	4,108,000	8,458,000	4,108,000	84,108,000	8,558,000	4,108,000	4,108,000	106,719,000	4,108,000	4,108,000
Terpelihara dan Terkoneksinya SIAK Online Di 40 Kecamatan dan 1 Dinas														
Tertaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	1,675,000	-	1,675,000	-	-	1,675,000	-	-	30,490,000	-	-

PAGU ANGGARAN (Rp.)														
OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Jumlah peserta Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1,651,000	1,675,000		1,675,000			1,675,000			30,490,000		
Persentase Update Penyediaan Data Profil Kependudukan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		1,651,000	3,901,000	1,651,000	3,901,000	1,651,000	33,571,800	3,676,000	1,651,000	1,651,000	3,676,000	1,651,000	1,651,000
Tersediannya Data Profil Kependudukan		Penyusunan Profil Kependudukan	1,651,000	3,901,000	1,651,000	3,901,000	1,651,000	33,571,800	3,676,000	1,651,000	1,651,000	3,676,000	1,651,000	1,651,000
Tersediannya Profil Kependudukan		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	1,651,000	3,901,000	1,651,000	3,901,000	1,651,000	33,571,800	3,676,000	1,651,000	1,651,000	3,676,000	1,651,000	1,651,000

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBER, Januari 2021
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon



DR. H. ADE-SETIADI, Drs., M.M.
NIP. 19611224 198903 1 004